

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP–AMP YKPN.
- Abdul Halim. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Biro Pusat Statistik. 2005. *Boyolali dalam Angka 2004*. BPS Kabupaten Boyolali.
- H.M. Nuh Fadillah dan Muhtar. 2004. *Proses Penyusunan Anggaran & Pengalokasian Belanja di Pemda Kabupaten Wonogiri*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol.19, No.1, 27-56. Universitas Gadjah Mada.
- Hadari Nawawi. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press.
- Helfert, Erich. 1996. *Teknik Analisis Keuangan*. Jakarta: Erlangga.
- Indra Bastian, Gatot Soepriyanto. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Indra Bastian. 2001. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Lina Widyawati. 2006. *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Daerah di Kabupaten Magetan*. Skripsi S 1 FE-UMS, tidak dipublikasikan.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. *Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik: Telaah Kritis Terhadap Kebutuhan Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah*. UNISIA NO. 46/XXV/III/2002.
- Mohamad Mahsun. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Nataluddin. 2001. Potensi dana perimbangan daerah pada pemerintah daerah di Propinsi Jambi, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nirzawan. 2001. Tinjauan umum terhadap sistem pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Bengkulu Utara, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.

- Setu Setyawan. 2003. *Pengukuran Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Dilihat dari Prespektif Akuntabilitas*. Balance, Vol.1, No.1. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Malang.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- Widodo. 2001. *Analisa Rasio Keuangan Daerah dalam menghadapi Otonomi Daerah, Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP YKPN.
- _____. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhirungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*.
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.